BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan dalam penulisan Tesis ini, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

4.1.1. Efektifitas penerapan Pasal 18 PM Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2016

Terhadap peran MKN dalam melindungi profesi Notaris di kota Bengkulu terbukti masih belum optimal. Mengingat perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN wilayah Bengkulu hanyalah sebatas memberikan persetujuan dan penolakan atas pemanggilan Notaris yang diajukan oleh penyidik, tanpa adanya pendampingan hukum lebih lanjut. Padahal apabila kita cermati lebih lanjut Pasal 18 ayat 2, maka dapat diketahui bahwa tugas yang wajib dilakukan oleh MKN dalam melindungi profesi Notaris adalah menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya serta memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

4.1.2. Pengaturan tentang perlindungan profesi Notaris yang diberikan oleh

MKN guna menjamin kepastian hukum pada prakteknya hingga saat ini masih belum optimal, sehingga guna mengoptimalkan penerapan aturan tersebut perlu kiranya untuk menambahkan frasa ayat c dan d pada Pasal 18 PM Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, yaitu : c. dalam rangka

memberikan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan pendampingan hukum kepada Notaris tersebut hingga proses hukum selesai; d. dalam rangka memberikan penolakan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan pemanggilan tersebut kepada publik demi menjaga nama baik Notaris yang bersangkutan.

4.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan Penulis di atas, maka Penulis hendak mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

4.2.1. Bagi MKN sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada profesi Notaris, khususnya yang memiliki wilayah kerja di kota Bengkulu, mengingat tidak sedikit Notaris kota Bengkulu yang dipanggil oleh penyidik guna memenuhi proses penyidikan, sehingga sangat dibutuhkan suatu proses pendampingan hukum yang dapat diberikan oleh MKN dalam proses penyidikan tersebut.

4.2.2. Bagi Pemerintah seharusnya turut memperhatikan pentingnya kepastian hukum yang terdapat dalam suatu perUndang-Undangan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum terhadap profesi Notaris,

mengingat Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya merupakan pelaksanaan dari sebagian tugas negara di bidang hukum perdata.